



PAPER – OPEN ACCESS

Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Terhadap Pengalokasian Belanja Modal di Provinsi Sumatera Utara

Author : Redha Fauriza
DOI : 10.32734/lwsa.v1i1.160
Electronic ISSN : 2654-7058
Print ISSN : 2654-7066

Volume 1 Issue 1 – 2018 TALENTA Conference Series: Local Wisdom, Social and Arts



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

Published under licence by TALENTA Publisher, Universitas Sumatera Utara



Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Terhadap Pengalokasian Belanja Modal di Provinsi Sumatera Utara

Redha Fauriza^a ; Salbiah^a ; Iskandar Muda^a

^a*Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sumatera Utara*

ismuda0507@yahoo.com

Abstract

This research aims to analyze the Influence of regional revenues, production sharing fund, general allocation fund, special allocation fund, and surplus of budget financing partially and simultaneously on allocation capital expenditure in districts/cities in the Province of North Sumatera year period 2009 - 2013. This research is a kind of causal research and is a replication of the earlier research. The Population was 33 districts/cities in the Province of North Sumatera. The sample selection is done by purposive sampling method and obtained 22 districts/cities as samples. The data used in this research obtained income and expenditure budget (APBD) report from website of Directorate General of Fiscal Balance, Ministry of Finance Republic of Indonesia (www.djpk.depkeu.go.id). Testing statistical analysis of the data using multiple linear regression analysis to test the classical assumption first: test of normality, multicollinearity, heteroscedasticity, and auto correlation, then test the coefficient of determination and testing the hypothesis with T test and F test with a SPSS software program. The result of the research showed that the partially regional revenues (PAD) have a positive significant influence on capital expenditure, production sharing fund have a negative significant influence on capital expenditure, general allocation fund have a positive significant influence on capital expenditure, special allocation fund do not influence significant on capital expenditure, and surplus of budget financing have a positive significant influence on capital expenditure. While the Simultaneous regional revenues, production sharing fund, general allocation fund, special allocation fund, and surplus of budget financing significant influence on allocation capital expenditure in districts/cities in the Province of North Sumatera year period 2009 – 2013.

Keywords: Capital Expenditure; Regional Revenue (PAD); Balancing Funds; Production Sharing Fund; General Allocation Fund; Special Allocation Fund; Surplus of Budget Financing

1. Pendahuluan

Sejak tahun 1999 pemerintah melakukan reformasi dibidang pemerintahan dan pengelolaan keuangan daerah ditandai dengan ditetapkannya Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang direvisi dengan Undang – Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang – Undang Nomor 25 Tahun 1999 yang direvisi dengan Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Pemerintah daerah merupakan bagian yang tak terpisahkan dari pemerintah pusat sehingga dengan demikian pembangunan daerah diupayakan sejalan dengan arah dan tujuan pembangunan nasional. Sistem pemerintahan di

daerah dilaksanakan berdasarkan asas desentralisasi, asas dekonsentrasi, dan asas pembantuan, demi menjamin terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, pelayanan masyarakat yang lebih baik, mempertinggi tingkat kesejahteraan masyarakat, menjamin perkembangan dan pembangunan daerah, serta terwujudnya keserasian hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Dalam hal pengelolaan keuangan daerah, Pemerintah daerah menetapkan tujuan dan sasaran kemudian membuat rencana kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut. Pada sektor Pemerintahan, tujuannya bukanlah memaksimalkan laba tetapi lebih kepada *public service*. Pencapaian tujuan suatu Pemerintah daerah membutuhkan peran semua anggota yang ada dalam Pemerintahan. Agar tujuan Pemerintah mudah dicapai, maka diperlukanlah suatu pedoman yang disebut dengan anggaran. Anggaran Daerah adalah suatu rencana keuangan yang disusun sebagai alat untuk meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat. Dokumen anggaran daerah disebut APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) baik untuk provinsi maupun kabupaten/kota. Seluruh penerimaan dan pengeluaran pemerintah daerah baik dalam bentuk uang, barang, dan jasa pada tahun anggaran harus dianggarkan dalam APBD (Aprizay, *et al*, 2014). Menurut Erlina, *et al* (2012 : 33) Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) adalah " rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah di Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan oleh Peraturan Daerahl.

Berdasarkan Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, memberikan kewenangan yang luas kepada pemerintah daerah untuk mengurus rumah tangganya sendiri dengan sedikit campur tangan pemerintah pusat. Pemerintah daerah mempunyai hak dan kewenangan yang luas untuk menggunakan sumber – sumber keuangan yang dimilikinya sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang berkembang di daerah. Setiap daerah dituntut untuk mampu mengelola seluruh sumber daya yang dimiliki untuk membiayai seluruh belanja - belanja daerah berdasarkan azas kepatuhan, kebutuhan, dan juga kemampuan daerah seperti yang tercantum dalam anggaran daerah. Keberhasilan pemerintah daerah dapat dicerminkan dari peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat, keadilan, pemerataan, keadaan yang semakin maju, serta terdapat keserasian antara pusat dan daerah serta antar daerah.

Undang - Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, bahwa yang menjadi sumber - sumber pembiayaan untuk pembangunan daerah (*capital investment*) adalah pendapatan daerah dan pembiayaan. Pendapatan daerah berasal dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan yang diterima oleh daerah - daerah dari pemerintah pusat, dan Lain – Lain Pendapatan. Selain itu, juga terdapat sumber lain yang berasal dari pembiayaan berupa Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran, Penerimaan Pinjaman Daerah, Dana Cadangan Daerah, dan Hasil Penjualan Kekayaan yang dipisahkan.

Upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik tersebut, Pemerintah Daerah wajib mengalokasikan dana dalam bentuk anggaran belanja modal dalam APBD untuk menambah aset tetap. Belanja Modal merupakan belanja Pemerintah Daerah yang manfaatnya melebihi 1 tahun anggaran dan akan menambah aset atau kekayaan daerah dan selanjutnya akan menambah belanja yang bersifat rutin dengan perencanaan keuangan jangka panjang seperti biaya pemeliharaan pada aset tetap yang dihasilkan dari belanja modal. Belanja modal digunakan untuk memperoleh aset tetap pemerintah daerah seperti peralatan, infrastruktur, dan harta tetap lainnya.

2. Metode Penelitian

2.1. Jenis dan Sumber Data Penelitian

Penelitian ini menggunakan data kuantitatif yaitu data yang berupa angka atau besaran tertentu yang sifatnya pasti. Data ini merupakan data sekunder, yaitu data atau informasi yang telah diolah dan diperoleh dari Laporan Realisasi APBD melalui situs Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan Republik Indonesia www.djpk.depkeu.go.id selama periode 2009 - 2013.

2.2. Defenisi Operasional

2.2.1. Variabel Terkait (*Dependent Variable*)

Menurut Erlina (2011 : 36) merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, atau karena adanya variabel sebab atau variabel bebas || . Adapun variabel terikatnya adalah belanja modal. Belanja modal adalah

pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap berwujud yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal dilakukan dalam rangka pembentukan modal yang sifatnya menambah aset tetap / inventaris yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi, termasuk di dalamnya adalah pengeluaran untuk biaya pemeliharaan yang sifatnya mempertahankan atau menambah masa manfaat, meningkatkan kapasitas, dan kualitas asset.

2.2.2. Variabel Bebas (Independent Variable)

Menurut Sanusi (2013 : 50) variabel bebas merupakan variabel yang mempengaruhi variabel lain, atau variabel yang menjadi sebab berubah atau timbulnya variabel terkait.

1. Pendapatan Asli Daerah

Menurut Halim (2007 : 96), —Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerahl.

2. Dana Bagi Hasil

Menurut Ismail dan Rahim (2009 : 38), — Dana bagi hasil adalah dana yang bersumber dari APBN yang dibagikan kepada daerah berdasarkan angka persentase tertentu dengan memperhatikan potensi daerah penghasil.

3. Dana Alokasi Umum

Menurut Kusnandar (2012), — DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

4. Dana Alokasi Khusus

Menurut Nordiawan, *et. al* (2007 : 58) — DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan ke daerah tertentu untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan bagian dari program yang menjadi prioritas nasional.

5. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran

Menurut Abdullah (2013) —merupakan penerimaan daerah yang bersumber dari sisa kas tahun anggaran sebelumnya. sesuai Permendagri No. 13 Tahun 2006l.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Statistik Deskriptif

Penelitian ini mengambil sampel Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara dengan laporan APBD dari tahun 2009 – 2013. Total sampel dalam penelitian ini adalah 22 x 5 tahun penelitian yaitu sebanyak 110 sampel. Dengan Mean pada Belanja Modal 181026,30, Mean Pendapatan Asli Daerah 79384,85, Mean Dana Bagi Hasil 46606,21, Mean Dana Alokasi Umum 429093,37, Mean Dana Alokasi Khusus 53869,28, dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran 47164,25. Hasil Statistik deskriptif dapat dilihat didalam tabel 1.

Tabel 1: Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Belanja Modal	110	22739	1201667	181026,30	173565,639
Pendapatan Asli Daerah	110	4379	1758788	79384,85	235176,919
Dana Bagi Hasil	110	8640	319695	46606,21	53120,881
Dana Alokasi Umum	110	139981	1270245	429093,37	242621,389
Dana Alokasi Khusus	110	10314	739699	53869,28	68648,796
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran	110	325	380919	47164,25	66742,180
Valid N (listwise)	110				

Angka-angka tersebut dinyatakan dalam jutaan rupiah (Rp. 000.000)

Sumber: Hasil Output SPSS

3.2. Statistik Deskriptif

3.2.1. Uji Normalitas

Hasil menunjukkan bahwa Semua hasil pengujian melalui analisis grafik dan statistik menunjukkan hasil yang sama yaitu normal. Pada analisis grafik, grafik tidak condong ke kiri maupun condong ke kanan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa model regresi telah memenuhi asumsi normalitas. Pada analisis statistik (uji *One Sample Kolmogorof Smirnof*) diperoleh nilai *Kolmogorov-Smirnov Z* sebesar 0,859 dan *Asymp.Sig. (2-tailed)* adalah 0,451 dan nilai ini di atas 0,05 dengan kata lain variabel residual berdistribusi normal.

3.2.2. Uji Multikolonieritas

Dari hasil uji multikolonieritas, dapat dilihat bahwa nilai *tolerance* Pendapatan Asli Daerah (X1), Dana Bagi Hasil (X2), Dana Alokasi Umum (X3), Dana Alokasi Khusus (X4), dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (X5) tidak kurang dari 0,1 yaitu : 0,465, 0,251, 0,286, 0,902, 0,458. Sedangkan nilai *VIF* Pendapatan Asli Daerah (X1), Dana Bagi Hasil (X2), Dana Alokasi Umum (X3), Dana Alokasi Khusus (X4), dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (X5) tidak lebih dari 10 yaitu : 2,153, 3,986, 3,491, 1,109, 2,185. Maka dapat dinyatakan bahwa tidak terjadi multikolinieritas diantara variabel independen dalam penelitian.

3.2.3. Uji heteroskedastisitas

Dari hasil tampilan output *scatter plot*, *scatter plot* menunjukkan titik data menyebar secara acak tidak membentuk sebuah pola tertentu atau tidak teratur, serta titik - titik menyebar secara jelas yaitu di atas, di bawah dan di sekitar angka nol pada sumbu Y maka data penelitian bebas dari heterokedastisitas dan data layak digunakan untuk penelitian.

3.2.4. Uji Autokorelasi

Berdasarkan hasil output bahwa nilai *Durbin Watson* sebesar 1,603 yang berarti tidak terjadi terjadi autokorelasi, yang terbukti dari angka D-W yang dihasilkan terletak di antara -2 sampai +2 yang artinya tidak terjadi autokorelasi. Berdasarkan pada kolom *Unstandardized Coefficients* bagian B diperoleh model persamaan regresi linear berganda yaitu

$$Y = 32640,833 + 0,526PAD - 0,970DBH + 0,312DAU - 0,44DAK + 0,432 SiLPA$$

Nilai koefisien determinasi yang sudah disesuaikan (*Adjusted R Square*) sebesar 0,871, artinya 87,1% variabel dependen (Belanja Modal) dapat dijelaskan oleh variabel independen yaitu Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran, dan sisanya sebesar 12,9% (100% - 87,1%) dapat dijelaskan oleh variabel lain diluar variabel yang digunakan. angka R sebesar 0,936 menunjukkan bahwa hubungan antara variabel Y (Belanja Modal) dengan X1 (Pendapatan Asli Daerah), X2 (Dana Bagi Hasil), X3 (Dana Alokasi Umum), X4 (Dana Alokasi Khusus), dan X5 (Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran) sangat erat yaitu sebesar 0,936 (93,6%). Semakin besar R berarti hubungan semakin erat. Angka *R Square* (Koefisien Determinasi) adalah sebesar 0,877, artinya angka ini mengindikasikan bahwa 87,7% variasi atau perubahan dalam Belanja Modal dapat dijelaskan oleh variasi variabel Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran, sedangkan sisanya dijelaskan oleh sebab-sebab lain yang tidak dimasukkan kedalam model penelitian.

3.3. Pengujian Hipotesis

3.3.1. Pengujian Hipotesis Parsial (Uji Signifikan T)

Variabel Pendapatan Asli Daerah (X₁) memiliki nilai signifikansi 0,000 < 0,05 artinya signifikan. Sedangkan t hitung 14,102 > dari t tabel 1,982 artinya signifikan. Signifikan disini berarti Ho ditolak dan Ha diterima. Dapat disimpulkan bahwa variabel X₁ memiliki kontribusi terhadap Y. Nilai t positif menunjukkan bahwa variabel X₁ mempunyai hubungan yang searah dengan Y. Jadi dapat disimpulkan Pendapatan Asli Daerah memiliki pengaruh signifikan positif terhadap Belanja Modal.

Variabel Dana Bagi Hasil memiliki nilai signifikansi $0,000 < 0,05$ artinya signifikan. Sedangkan t hitung $4,319 >$ dari t tabel $1,982$ artinya signifikan. Signifikan disini berarti H_0 ditolak dan H_a diterima. Dapat disimpulkan bahwa variabel X_2 memiliki kontribusi terhadap Y . Nilai t negatif menunjukkan bahwa variabel X_2 mempunyai hubungan yang berlawanan arah dengan Y . Jadi dapat disimpulkan Dana Bagi Hasil berpengaruh signifikan negatif terhadap Belanja Modal. Variabel Dana Alokasi Umum memiliki nilai signifikansi $0,000 < 0,05$ artinya signifikan. Sedangkan t hitung $6,780 >$ dari t tabel $1,982$ berarti signifikan. Signifikan disini berarti H_0 ditolak dan H_a diterima. Dapat disimpulkan bahwa variabel X_3 memiliki kontribusi terhadap Y . Nilai t positif menunjukkan bahwa variabel X_3 mempunyai hubungan yang searah dengan Y . Jadi dapat disimpulkan Dana Alokasi Umum berpengaruh signifikan positif terhadap Belanja Modal.

Variabel Dana Alokasi Khusus memiliki nilai signifikansi $0,631 > 0,05$ artinya tidak signifikan. Sedangkan t hitung $0,481 <$ dari t tabel $1,982$ berarti tidak signifikan. Tidak signifikan disini berarti H_0 diterima dan H_a ditolak. Dapat disimpulkan bahwa variabel X_4 tidak memiliki kontribusi terhadap Y . Nilai t negatif menunjukkan bahwa variabel X_4 mempunyai hubungan yang berlawanan arah dengan Belanja Modal. Dapat disimpulkan bahwa Dana Alokasi Khusus tidak berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal.

Variabel Sisa lebih Pembiayaan Anggaran memiliki nilai signifikansi $0,001 < 0,05$ artinya signifikan. Sedangkan t hitung $3,263 >$ dari t tabel $1,982$ berarti signifikan. Signifikan disini berarti H_0 ditolak dan H_a diterima. Dapat disimpulkan bahwa variabel X_5 memiliki kontribusi terhadap Y . Nilai t positif menunjukkan bahwa variabel X_5 mempunyai hubungan yang searah dengan Belanja Modal.

4. Pengujian Hipotesis Simultan (Uji Signifikan F)

Berdasarkan hasil output menunjukkan tingkat signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$, artinya signifikan, sedangkan F hitung $147,966 >$ dari F tabel $2,30$ artinya signifikan ($df_1 = 6-1=5$ dan $df_2 = 110-6=104$). Signifikan disini berarti H_a diterima dan H_0 ditolak. Artinya variabel Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran secara bersama - sama (simultan) berpengaruh terhadap Belanja Modal pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara.

5. Kesimpulan dan Saran

5.1 Kesimpulan

1. Secara Simultan Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal Pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara Periode 2009 – 2013.
2. Transfer dari pemerintah pusat berupa dana perimbangan merupakan bagian terbesar dari total penerimaan daerah. Hal ini mengindikasikan bahwa pemerintah daerah belum seluruhnya mampu mandiri secara finansial dari bantuan pemerintah pusat. Ciri utama daerah yang mandiri adalah ketergantungan kepada bantuan pusat harus seminimal mungkin dan PAD harus menjadi sumber keuangan terbesar. Dari ketiga bentuk dana perimbangan tersebut, alokasi Dana Alokasi Umum memiliki proporsi terbesar dalam keuangan daerah.

5.2. Keterbatasan

1. Penelitian ini hanya meneliti 22 Kabupaten/Kota dari 33 Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara, pemilihan sampel didasarkan pada ketersediaan data yang lengkap dalam kurun waktu 2009 – 2013. Hal ini menyebabkan hasil penelitian hanya berlaku untuk Kabupaten/Kota yang menjadi sampel penelitian sehingga belum dapat di generalisasikan untuk seluruh Kabupaten/Kota di Indonesia.
2. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini hanya Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, Dana, Alokasi Khusus, dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran padahal lebih banyak lagi komponen – komponen didalam APBD yang dapat dikaitkan dengan Belanja Modal.

5.3. Saran

1. Penelitian selanjutnya, agar memperluas dan menambah sampel penelitian diluar Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara agar dapat membandingkan apakah hasil penelitian ini berlaku untuk Kabupaten/Kota di luar Provinsi Sumatera Utara atau seluruh Indonesia dengan menambah periode pengamatan, dan menambah variabel independennya yang tidak dimasukkan kedalam penelitian ini seperti: fiscal stress yang dapat melihat pertumbuhan dari variabel independen terhadap Belanja Modal, serta kebijakan pemerintahan lainnya yang dapat dikaitkan dengan Belanja Modal.
2. Pemerintah harusnya lebih tanggap terhadap ketergantungan yang besar pada DAU, dapat dilihat bahwa penerimaan DAU jauh lebih besar dari pada Penerimaan lainnya, khususnya Pendapatan Asli Daerah dan Pendapatan Lain – lain yang dianggap Sah. Ketergantungan DAU yang terlalu besar mengakibatkan kurangnya kemandirian daerah untuk meningkatkan alokasi Belanja Modal.

5.4. Acknowledgement

Penelitian ini ditujukan kepada Kabupaten Kota di Sumatera Utara Agar dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dengan memanfaatkan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Terima kasih kepada Direktorat Perimbangan Keuangan Republik Indonesia yang sudah memberikan data yang diperlukan.

Daftar Pustaka

- [1] Filippini, Massimo, and Lester C. Hunt. (2011) "Energy demand and energy efficiency in the OECD countries: a stochastic demand frontier approach." *Energy Journal* **32** (2): 59–80.
- [2] Filippini, Massimo, and Lester C. Hunt. (2012) "US residential energy demand and energy efficiency: A stochastic demand frontier approach." *Energy Economics* **34** (5): 1484–1491.
- [3] Weyman-Jones, Thomas, Jùlia Mendonça Boucinha, and Catarina Feteira Inácio. (2015) "Measuring electric energy efficiency in Portuguese households: a tool for energy policy." *Management of Environmental Quality: An International Journal* **26** (3): 407–422.
- [4] Saunders, Harry (2009) "Theoretical Foundations of the Rebound Effect", in Joanne Evans and Lester Hunt (eds) *International Handbook on the Economics of Energy*, Cheltenham, Edward Elgar
- [5] Sorrell, Steve (2009) "The Rebound Effect: definition and estimation", in Joanne Evans and Lester Hunt (eds) *International Handbook on the Economics of Energy*, Cheltenham, Edward Elgar
- [1] Abdullah, SyukriydanHalim, Abdul. 2013. Defesit/Surplus danSiLPAdalamAnggaran Daerah ~ Apakahsalingberhubungan? <http://syukriy.wordpress.com/2013/01/01/defisit-dan-surplus-dalam-anggaran-daerah-apakah-saling-berhubungan/>.
- [2] Aprizay, Yudi Satrya, Darwanis, dan Arfan M, 2014. — *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Terhadap Pengalokasian Belanja Modal Pada Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh*", Jurnal Akuntansi Pasca Sarjana Universitas Syiah Kualla, Volume 3 Nomor 1 Februari 2014 pp. 140-149.
- [3] Anggiat dan Manurung, 2009. — *Efek memiliki Pendapatan Asli Daerah, Pengalokasian Dana Umum, dan Dana Khusus pada Belanja Modal di Kota dan Kabupaten Sumatera Utara*". Kajian Akuntansi, Volume 4, Nomor 2 Desember 2009: 93-103, Issn 1907-1442.
- [4] Bastian, Indra, 2001. *Manual Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah*, Pusat Pengembangan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- [5] Bastian, Indra, 2001. *Akuntansi Sektor Publik di Indonesia*, Pusat Pengembangan Akuntansi, Fakultas Ekonomi Gadjah Mada, BFE Yogyakarta.
- [6] Bastian, Indra, 2006. *Sistem Akuntansi Sektor Publik*, Edisi 2, Salemba Empat, Jakarta.
- [7] Dewanto, Eko, 2009. *Pengaruh Capital Expenditure Terhadap Laba Pada Perusahaan Manufaktur Periode 1999 – 2007*", FE UI.
- [8] Erlina, Sirojuzilam dan Rasdianto, 2012. *Pengelolaan dan Akuntansi Keuangan Daerah*, USU Press, Medan.
- [9] Erlina dan Rasdianto, 2013. *Akuntansi Keuangan Daerah Berbasis Akrual*, Brama Ardian, Medan.
- [10] Erlina, 2011. *Metodologi Penelitian*, USU Press, Medan.
- [11] Felix, Olurankinse. 2012. — *Analysis of the effectiveness of capital expenditure budgeting in the local government system of Ondo State, Nigeria. Journal of Accounting and Taxation*", 4(1), pp: 1-6.
- [12] Ghozali Imam, 2005, *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*, Badan Peneliti, Universitas Diponegoro Semarang.
- [13] Hadi, Syamsul, 2006. *Metodologi Penelitian Kuantitatif Untuk Akuntansi dan Keuangan*, Ekonisia, Yogyakarta.
- [14] Halim, Abdul, 2008. *Akuntansi Keuangan Daerah*, Edisi Tiga, Salemba Empat, Jakarta.
- [15] Halim, Abdul, 2004. *Akuntansi Keuangan Daerah*, Edisi Revisi, Salemba Empat, Jakarta.
- [16] Halim, Abdul, 2002. *Akuntansi Keuangan Daerah*, Edisi Pertama, Salemba Empat, Jakarta.
- [17] Ismail, Gusnar dan Rahim, Idris, 2009. *Pengelolaan Keuangan Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan BLU*, Indeks, Jakarta.
- [18] Jean, Faguet 2005. *The Effects of Decentralisation on Public Investment: Evidence and Four Lessons From Bolivia and Colombia, Crisis States Programme*", June 2005, LSE.

- [19] Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sumatera Utara, 2014. *Buku Pedoman Penulisan Skripsi dan Ujian Komprehensif Program Strata Satu*, Fakultas Ekonomi Universitas Sumatera Utara.
- [20] Kusnandar, dan Siswanto, Dodik, 2012. “ *Pengaruh Dana Alokasi Umum, Pendapatan Asli Daerah, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran dan Luas Wilayah Terhadap Belanja Modal*”, SNA XV Banjarmasin 20-23 September 2012.
- [21] Lubis, Ade Fatma, Akhmad, Arifin, dan Syarif, Firman, 2007. *Aplikasi SPSS (Statistical Product and Service Solution) untuk Penyusunan Skripsi dan Tesis*, USU Press, Medan.
- [22] Mursyidi, 2009. *Akuntansi Pemerintahan Di Indonesia*, Reflika Aditama, Bandung.
- [23] Muda, Iskandar, *et al* , 2014. —*The Effect Of Fiscal Potential, Fiscal Needs And Internal Control On The Provincial Intergovernmental Transfer Allocation In The Districts / Cities In North Sumatera – Indonesia*”. *International Journal of Management Sciences and Business Research*, 2014 ISSN (2226 - 8235) Vol-3, Issue 10.
- [24] Muda, Iskandar, 2012. —*Variabel yang Mempengaruhi Fiscal Stress pada Kabupaten/Kota Sumatera Utara*”. *Jurnal Keuangan dan Bisnis*, Volume 4 No. 1, Maret 2012.
- [25] Nordiawan, Deddi, Iswahyudi dan Maulidah, 2007. *Akuntansi Pemerintahan*, Salemba Empat, Jakarta.
- [26] Prasetya, Ferry, 2012. “ *Modul Ekonomi Bagian V: Teori Pengeluaran Pemerintah*”, Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Brawijaya, Malang.
- [27] Renyowijoyo, Muindro, 2008. *Akuntansi Sektor Publik Organisasi Non Laba*, Mitra Wacana Media, Jakarta.
- [28] Republik Indonesia, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang *Pedoman Pengurusan, Pertanggung jawaban, dan Pengawasan Keuangan Daerah Serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah, dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah*.
- [29] Republik Indonesia, Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang *Pemerintahan Daerah*.
- [30] Republik Indonesia, Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang *Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*.
- [31] Republik Indonesia Undang – Undang Nomor 34 tahun 2000 tentang *Pajak daerah dan Retribusi daerah*.
- [32] Republik Indonesia, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang *Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*.
- [33] Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang *Pajak Daerah*.
- [34] Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang *Retribusi Daerah*.
- [35] Sanusi, Anwar, 2013. *Metodologi Penelitian Bisnis*, Salemba Empat, Jakarta.
- [36] Situmorang, Syafrizal helmi dan Lufti, Muslich, 2012. *Analisis Data Untuk Riset Manajemen dan Bisnis*, USU Press. Medan.
- [37] Situmorang, Syafrizal helmi, *et al*, 2007. *Analisis Data Penelitian (Menggunakan Program SPSS)*, USU Press, Medan.
- [38] Sianipar, Eva Septriani, 2011, —*Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan Dana Perimbangan Terhadap Pengalokasian Belanja Modal Pada Kabupaten / Kota di Provinsi Sumatera Utara*, Strata Satu, Fakultas Ekonomi, Universitas Sumatera Utara.
- [39] Sumarmi, Saptaningsih, 2014. —*Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus Terhadap Alokasi Belanja Modal Daerah Kabupaten / Kota di Provinsi DI. Yogyakarta*. *Jurnal Dosen Tetap Fakultas Ekonomi Universitas PGRI Yogyakarta*.
- [40] Syaiful, 2006. *Pengertian dan Perlakuan Akuntansi Belanja Barang dan Belanja Modal dalam Kaidah Akuntansi Pemerintah*.
- [41] Syahputra, Indra, 2010. —*Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Daerah Kabupaten / Kota Di Provinsi Sumatera Utara*”. Tesis, Magister Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Sumatera Utara.
- [42] Wandira, Arbie Gugus, 2013. —*Pengaruh PAD, DAU, DAK, dan DBH Terhadap Pengalokasian Belanja Modal*”, *Accounting analysis Journal*, Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Semarang, Indonesia.
- [43] Zega, Happy Septariana, 2014. —*Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Bagi Hasil, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran dan Luas Wilayah Terhadap Belanja Modal Dengan Dana Alokasi Khusus Sebagai Variabel Moderating Pada Pemerintah Kabupaten / Kota Di Sumatera Utara*”, Tesis, Magister Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Sumatera Utara